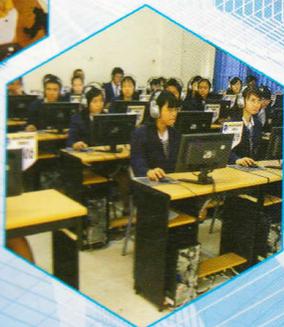
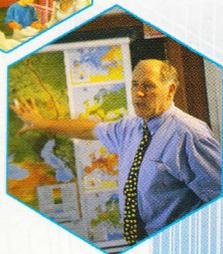


ABDUL SANI
SURANTO

PROFESIONALISME GURU MEMBANGUN SEKOLAH UNGGUL BERKARAKTER

(Tantangan Masa Depan)



Abdul Sani

Suranto S. Siswaya

Profesionalisme Guru Membangun Sekolah Unggul Berkarakter

[Tantangan Masa Depan]



PENERBIT

PT. SINDUR PRESS SEMARANG

Profesionalisme Guru Membangun Sekolah Unggul Berkarakter

Penerbit:

PT. Sindur Press

Semarang

Jl. Pleburan VIII/64, Semarang

Telp. (024) 6580335, 6582901

Fax. (024) 6582903, 6581440

Penulis : Abdul Sani
Suranto S. Siswaya
Editor : Hesti Hardinah
Perancang Sampul : Sucipto
Layout : Sumiati
Ilustrator : Sugiyatno

ISBN : 978-979-067-034-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah swt dan Shalawat kepada junjungan Baginda Rasul Muhammad saw. Memimpin umat Islam dan umat manusia (bagi yang merasa mau dipimpin) untuk meretas kehidupan gemilang, sukses dunia akhirat. Kita curahkan secara yakin dan sungguh-sungguh kepada kuasanya dan panduan iman kerasulannya. Atas semua pencerahan itu, sekaligus atas selesainya buku yang berjudul "Profesionalisme Guru : Membangun Sekolah Unggul Berkarakter?" Atas semua itu, wajar kita bersyukur.

Naskah ini sangat sederhana dan berbicara berbagai pengalaman dan praktik teori, namun kemunculannya untuk memberikan sumbangan setitik nuansa kepada kawan guru yang sampai saat ini masih prihatin dalam profesi yang seperti masih dianggap sebelah mata oleh petinggi negeri ini dan pengambil kebijakan. Ada kelakar kawan, kalau mau naik gaji dan sedikit berkeringat untuk menambah isi dompet, maka guru harus berdemo dan ke jalan ramai-ramai. Baru kebijakan berubah sedikit-demi sedikit.

Guru di Republik ini kadangkala bisa cerah terlintas di pelataran profesinya, namun bisa jadi terlindas, karena tuduhan kerusakan multi-dimensi bangsa ini dialamatkan kepada guru walau bukan satu-satunya, karena gagal

mendidik siswa arif dalam kehidupan keseharian. Anak didik yang gagal jadi makian, guru yang mendidik jadi cacian.

Buku ini sangat reflektif dan teoritik, namun juga membahas sisi praktis, semoga bisa memberikan setitik ilham atau semangat untuk menaikkan citra profesionalnya. Dengan profesionalisme guru, maka akan terbangun sekolah yang unggul, bermartabat dan memiliki karakter. Harapan semoga ketangguhan dan kegigihan guru tetap tidak pudar. Peningkatan citra, martabat harga diri, semoga tidak semata tertumpu kepada kesejahteraan. Pemerintah terus menerus meningkatkan kesejahteraan, diiringi sang guru terus-menerus meningkatkan profesional keguruannya yang bernilai kejayaan.

Terimakasih kepada semua pihak, atas bantuannya. Harapan agar buku ini dapat bermanfaat.

Akhirnya, kepada pembaca (guru), jangan patah semangat meraih profesi kendati banyak kendala.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar _____ iii

Daftar Isi _____ v

Goresan Kasih _____ vii

1. Pendidik Berkualitas, Dicari?

A. Pendahuluan _____ 1

B. Benarkah Guru Berkualitas Dicari? _____ 7

2. Gambaran Guru di Indonesia Dewasa Ini

A. Pembaruan Pendidikan dan Tenaga Pendidik
(Guru) _____ 13

B. Peran Guru dalam Pendidikan _____ 19

C. Realitas Problematika Guru _____ 21

D. Perbaikan Proses Profesionalisme Guru _____ 26

3. Guru dalam Profesi dan Tantangan Masa Depan

A. Guru di Lintasan Sejarah atau Dilindas
Sejarah _____ 29

B. Mengubah Paradigma Peran Guru _____ 35

4. Aspek Ciri Profesional Guru Sekolah Unggul Berkarakter

- A. Pengertian Profesionalisme Guru _____ 46
- B. Ciri Guru Profesional _____ 46
- C. Sikap Guru Profesional _____ 48
- D. Aspek Profesionalisme Guru _____ 49
- E. Peran Guru _____ 51
- F. Guru Idola Siswa _____ 52
- G. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru _____ 54
- H. Peran Sertifikasi Guru _____ 59
- I. Ciri Guru Profesional _____ 60
- J. Prinsip Sertifikasi _____ 61

Daftar Pustaka _____ 64

Goresan Kasih

Karya ini dipersembahkan khusus & istimewa untuk Sang Penggenggam segala maha yang telah membuat dunia penuh keajaiban dan tak lupa buat siapa saja yang merasa akrab dengan perubahan positif, kemajuan pendidikan, peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme bagi guru. Semoga guru Indonesia bisa hidup dalam Indonesia berkeadilan dan kemakmuran. Jayalah terus kiprah para guru....

Telaah Religi

Siapapun orangnya berlakulah bijak, hindari korupsi,
dan memakan yang bukan haknya...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu.....

(Q.S. An Nisa'[4]: 29)

Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia
berkata: "apakah yang memalingkan mereka (umat Islam)
dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah
berkiblat kepadanya?", katakanlah: kepunyaan Allahlah
timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa
yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

(Q.S. Al Baqarah[2]: 142)

Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat
terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang,
sesungguhnya Kami (Allah) benar-banar Maha Kuasa.

(Q.S. Al Ma'arij [70] : 40)

1

Pendidik Berkualitas, Dicari?

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia, terutama sejak Indonesia merdeka terlihat masih terpuruk. Secara umum kualitas sistem pendidikan kita masih belum bisa dibanggakan, sebagaimana disinyalir oleh banyak kalangan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, lulusan lembaga pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki.

Menurut pengamat ekonom, Berry Priyono dalam Sani, [2006], bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan tidak memadai untuk dipergunakan secara mandiri, karena yang dipelajari di lembaga pendidikan sering kali hanya terpaku pada teori, sehingga peserta didik kurang inovatif dan kreatif (*Kompas*, 4-12 : 2004) dalam Sani [2006]. *Kedua*, peringkat *Human Development Index (HDI)* Indonesia masih rendah (tahun 2006 peringkat 117 dari 151 negara dan tahun 2007 peringkat 110 di bawah Vietnam dengan peringkat 108) [Sani 2005].

Ketiga, laporan *International Educational Achievement (EA)* bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. *Keempat*, mutu akademik antar bangsa melalui *Programme for International Student Assessment (PISA) 2003* menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA, Indonesia menempati peringkat ke-38, sementara bidang Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat ke-39. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, peringkatnya sangat jauh, untuk bidang IPA menempati peringkat ke-8, membaca peringkat ke-7 dan Matematika peringkat ke-3. *Kelima*, laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada pada posisi 46 dari 47 negara yang disurvei. *Keenam*, posisi Perguruan Tinggi Indonesia yang dianggap favorit, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada hanya berada pada posisi ke-61 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia (*Asiaweek*, 2000) dalam Sani [2006]. *Ketujuh*, ketertinggalan bangsa Indonesia dalam bidang IPTEK dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kedua itu diperparah lagi dengan maraknya jual beli gelar yang menghasilkan gelar dan ijazah palsu. Lebih ironis lagi penjual dan pembeli gelar palsu dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai tokoh masyarakat. Gelar tersebut diperoleh tanpa melalui proses pendidikan yang sebenarnya. Di satu sisi, orang dengan susah payah berusaha mendapatkan gelar, di sisi lain gelar itu diobral. Sungguh suatu ketidakadilan yang sangat nyata. Pernyataan Budirahayu (2002) dalam Sani [2006] memperjelas masalah ini bahwa maraknya

pasar gelar yang dilakukan oleh dunia pendidikan tinggi yang tidak bertanggung jawab seakan memfasilitasi keinginan masyarakat yang malas bersusah payah menempuh pendidikan, namun mereka memiliki uang dan ingin dipandang atau dihormati dengan gelar yang disandangnya. Jangan heran kalau di negara kita banyak orang yang memiliki gelar, tetapi tidak siap pakai, apalagi mampu menciptakan lapangan kerja.

Kondisi pendidikan di Indonesia seperti dijelaskan di atas, semakin nyata dengan tabel 1.1.

Tabel 1.1. Landasan Pencari Kerja (Tenaga Kerja yang Belum Terserap Menurut Pendidikan)

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	278.329	3,5
Tidak/Belum Tamat SD	573.097	7,2
Tamat SD	1.893.565	23,7
Tamat SMP Umum	1.786.317	22,3
Tamat SMA Umum	1.881.578	23,5
Tamat SMA Kejuruan	1.051.912	13,1
Tamat Akademi/Diploma	289.134	3,1
Tamat Universitas	289.099	3,6

Sumber: Laporan Kompas Akhir Tahun dari data, BPS dalam Kompas, 11 Februari 2006

Menurut sumber lain laporan Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, bahwa Pengangguran di Indonesia hampir 70%, didominasi oleh kaum muda. Perlu menjadi pemikiran semua pihak, bahwa pengangguran di Indonesia sangat besar.

Hal ini bisa ditunjukkan dalam tabel 1-2 sampai tabel 1-4 Berdasarkan data, maka strategi pendidikan di Indonesia

juga harus dievaluasi karena ikut andil dalam menyiapkan kualitas SDM dan keluaran yang dihasilkan.

Tabel 1-2. Pengangguran Menurut Umur di Indonesia

Golongan Umur	Laki-laki (ribuan)	Perempuan (ribuan)	Jumlah (ribuan)
15-24	2.712	2.071	4.783
24-34	3.171	3.350	6.521
35-44	3.047	3.542	6.589
45-54	2.631	2.577	5.208
55+	3.251	2.115	5.367
Jumlah	14.812	13.655	28.467

Sumber: Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Tabel 1-3. Penganggur Terbuka Menurut Kategori Pengangguran

Kategori Pengangguran	Laki-laki (ribuan)	Perempuan (ribuan)	Jumlah (ribuan)
Mencari pekerjaan	3.171	2.452	5.623
Mempersiapkan usaha	49	65	114
Merasa tidak mungkin mendapat kerjaan	1.417	1.665	3.082
Sudah kerja tapi belum mulai kerja	291.0	421.0	712.0
Jumlah	4.928	4.603	9.531

Sumber: Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Tabel 1-4. Pengangguran di Indonesia Secara Makro Menurut Pendidikan

Kategori Pengangguran	Laki-laki (ribuan)	Perempuan (ribuan)	Jumlah (ribuan)
< SD	9.847	10.240	20.087
SLTP	2.809	1.951	4.761
SLTA	1.687	1.016	2.703
Diploma/Akademi	197	217	413
Universitas	272	232	504
Jumlah	14.812	13.655	28.467

Sumber: Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Mengingat hal itu, maka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dapat ditempuh melalui program dan kebijakan. *Pertama*, meningkatkan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. *Kedua*, memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik atau masyarakat penyandang cacat. *Ketiga*, meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan atau pendidikan nonformal yang bermutu; *Keempat*, meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan. *Kelima*, meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. *Keenam*, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. *Ketujuh*, menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi dalam proses perbaikan mutu

pendidikan. *Kedelapan*, meningkatkan kualitas kurikulum dan pelaksanaan yang bertujuan membentuk karakter dan kecakapan hidup (*life skill*), sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia yang inovatif serta produktif [Sani, 2006]

Apa yang mesti dilakukan untuk itu, ada beberapa persoalan yang mesti ditindaklanjuti [Sani, 2006].

1. Membangun sistem pendidikan yang kuat dan mengedepankan roh dan spiritual pendidikan sebagai fondasi kuat untuk arah dan kebijakan. Selama ini UU Sisdiknas yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20%, akan tetapi harus tetap sasaran, bukan penyelewengan dan potongan [rabat] proyek yang besar.
2. Merekonstruksi ulang otonomi, baik Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, sekolah dan guru serta masyarakat stakehoders berinovasi, berkreasi dan bertanggung-jawab secara penuh untuk mengemas pola dan desain pendidikan secara professional. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan kemadirian dan kompetensi menuju standar pendidikan secara nasional bahkan secara internasional.
3. Pola kesejahteraan guru dan pengelola pendidikan ditingkatkan lebih cepat lagi, terutama aspek pendanaan. Bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas siswa, kalau sekolah tidak diberikan legalitas dalam pencarian dana pendidikan ke tengah masyarakat.
4. Sudah saatnya sekolah diberikan kebebasan untuk menjalin kerja sama ke perusahaan-perusahaan atau industri untuk mendapatkan akses dana pendidikan termasuk

kepada lembaga donor luar negeri. Selama ini ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap daerah dan sekolah untuk mendapatkan dana pendidikan kepada founder (pendonor) luar negeri. Padahal sekiranya mereka (pihak sekolah) selalu didorong untuk berani mencari dana ke luar negeri melalui berbagai kerja sama, mencari pendanaan ke perusahaan yang beroperasi di daerah terutama yang terkait dalam usaha peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas siswa, niscaya kenaikan tingkat kesejahteraan itu bisa lebih cepat lagi.

Tulisan dalam buku ini tidak membahas masalah kualitas profesionalisme pendidikan secara umum, tetapi hanya berbicara tentang profesionalisme satu aspek, yaitu profesionalisme guru menuju sekolah unggulan, bermartabat dan memiliki karakter.

B. Benarkah Guru Berkualitas Dicari?

Pendidik di sini penulis batasi dalam istilah guru. Guru dalam konteks luas yaitu kualitas guru sebagai ujung tombak kekuatan kualitas pendidikan. Walaupun tidak bisa dipisahkan dalam lingkaran kualitas yang lain, namun pada dasarnya guru menjadi tumpuan kuat untuk melahirkan siswa yang berkualitas tinggi.

Pendidik dalam arti guru, tentu saja sebagai pendidik yang mau melahirkan siswa berkualitas, diharapkan terlebih dahulu gurunya juga berkualitas. Problematika yang menjadi lingkaran setan selama ini, ada anggapan bahwa guru bisa berkualitas kalau kesejahteraannya diperhatikan dan diprioritaskan. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak

seungguhnya benar. Kualitas guru bisa tidak tergantung pada indikator kesejahteraan, kalau guru benar-benar memiliki integritas tinggi dalam tugas dan fungsinya. Guru mempunyai disiplin diri dan berwawasan keilmuan. Penguasaan bahan-bahan ajar menjadi bagian tuntutan hidup sebagai guru.



Peningkatan kualitas guru dengan seminar.

Terpenting guru kreatif dalam mengaitkan profesi pendidikannya, misalkan guru mencari tambahan tugas lain sebagai penulis atau peneliti. Guru memperbanyak mengajar paralel, yaitu mengajar hanya dengan mata pelajaran yang sesuai SK keguruannya. Guru memberikan les privat kepada siswa dan sekolah terkait dengan keilmuannya. Guru aktif dalam memberikan bimbingan konseling kependidikan kepada siswa, dan seterusnya. Para guru kreatif dalam menghidupkan profesinya, seperti selalu mengajak siswa berkreasi dan berinovasi dalam penelitian iptek atau melakukan pelatihan siswa yang terkait dengan ilmu mutakhir. Misalkan guru bergigih diri melatih menguasai iptek dan informatika media, seperti pelatihan internet, pelatihan animasi komputer dan pembuatan game atau film kartun.

Peningkatan kualitas dengan jalan menyibukkan diri dalam tugas keguruan diarahkan untuk subyek keilmuannya adalah siswa yang ada di sekolah, dalam rangka menyejahterakan diri. Pada gilirannya berimbas kepada peningkatan kualitas secara timbal-balik, yaitu peningkatan kualitas siswa yang sekaligus juga secara otomatis peningkatan kualitas guru.

Guru jangan terpacu kepada bantuan peningkatan kesejahteraan yang dikelola oleh pemerintah melalui APBN/ APBD dan kucuran lainnya. Penulis beranggapan, guru yang bijak, justru jangan menggantungkan gaji hidup kepada PNS guru semata. Sekarang sekiranya guru kreatif, maka banyak tantangan keguruannya. Guru menjadi penulis buku teks pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran asuhannya. Guru dengan tim mata pelajaran tertentu sekarang ditantang untuk menulis buku teks baik oleh Diknas maupun oleh penerbit. Kalau sekiranya guru melihat peluang ini, maka peningkatan kualitas penguasaan kompetensi isi materi mata pelajarannya makin kuat.

Selain itu, guru berkualitas adalah guru yang mampu memandirikan siswa dan dirinya. Misalkan guru bahasa Inggris, akan terlihat kualitas kalau dia mengajarkan bukan semata-mata penguatan kebahasaan saja melainkan juga bagaimana menguatkan citra diri dan siswanya bahwa memotivasi siswa dan profesinya untuk merasa bangga dengan kemampuan bahwa menguasai bahasa Inggris itu, berarti kunci menguasai ilmu pengetahuan dan bahkan menguasai komunikasi dunia. Sebagaimana ditanamkan oleh negara Jepang dan China. *Kedua*, negara ini memotivasi penduduknya supaya mandiri menguasai bahasa asing tersebut. Guru-guru bahasa mereka bersemangat luar biasa menguasai bahasa Inggris tanpa merasa capek. Terbukti sekarang kedua negara itu, yang dalam tingkat penguasaan ipteknya, sungguh menakjubkan

karena mereka tidak mengalami kesulitan menguasai teks iptek dan berkomunikasi dalam bahasa dimaksud. Kemandirian motivasi yang selama ini kurang dimiliki oleh tenaga pengajar bahasa Inggris guru-guru di sekolah kita. Pengalaman penulis, guru bahasa Inggris kita ketika mau mengajar dan masuk kelas, langsung saja cas-cis-cus tanpa menanamkan satu motivasi, mendoktrinkan pentingnya bahasa asing. *Ketiga*, komunikasi membangun mental siswa, menanamkan niat kuat dan memacu terus-menerus kepada siswa secara mandiri agar jiwa mereka selalu dipompa untuk menguasai bahasa mutakhir, harus dilakukan oleh guru bahasa yang bersangkutan [Sani, 2006].

Pendidik (guru) berkualitas juga lahir dari tuntutan kompetitif. Artinya di dunia yang penuh dengan informasi sekarang, seharusnya tidak ada lagi guru yang santai, atau mencari penghasilan tambahan justru dengan jalan nyambi menarik ojek atau becak. Artinya bercermin kepada "roh" profesi. Guru berkualitas akan bisa lahir dengan jalan mengemas informasi dan menjadikannya sumber pendapatan, dengan jalan mendesain komoditas informasi sebagai bahan pengajaran, bahan seminar dan bahan pelatihan. Seorang guru yang mau bekerja keras mengejar kualitas keteringgalannya, bisa mengemas informasi itu sebagai bahan mata pencaharian tambahan. Jalan lempangnya, tentu seorang guru kreatif, mula-mula menghimpun diri dalam sebuah lembaga kepelatihan, LSM, Organisasi kependidikan atau membikin sekolah profesi, seperti membangun lembaga Play Group, SD Terpadu, SMP Internasional, SMK unggulan dan sebagainya. Minimal lembaga kursus dan lembaga setara khusus untuk membantu siswa lulus UAN. Kreativitas keguruan akan berimplikasi dan berpengaruh terhadap jiwa kekuatan guru.

Guru dapat meningkatkan sertifikasi tanpa tergantung dengan dana pemerintah. Walaupun demikian, sebenarnya bisa saja guru berkualitas profesi tinggi lahir asalkan guru punya kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan citra diri, bukan mengandalkan proyek pemerintah baik rabat program DAK, DAU, Dekons, SSN dan APBNP yang saat ini bergulir.

Dana beasiswa untuk meningkatkan jenjang pendidikan terbuka lebar. Selain dana dari pemerintah, juga dana dari perusahaan swasta pun banyak didapatkan. Misalnya perusahaan Rokok Djarum, Sampoerna atau perusahaan pertambangan seperti Adaro yang notabene mempunyai banyak dana kesejahteraan (*community development/CD*), yang manakala mereka itu dimintai pendanaan untuk meningkatkan jenjang pendidikan guru dari D.I, II dan III ke S1 atau S2 pasti bisa membantu pendanaan. Caranya dengan melakukan pendekatan dan kerja sama melalui kelembagaan, PGRI atau lembaga profesi keguruan lain. Dengan rekomendasi lembaga kiranya dana peningkatan sertifikasi itu akan didapatkan. Bukankah pepatah bijak terkenal "Banyak jalan menuju Roma", Banyak cara dan jurus meraih sukses. Guru kreatif tidak berdiam diri terhadap kemandegannya, melainkan selalu dinamis dan selalu senang menciptakan tantangan. Pengalaman penulis selaku pendidik, untuk meningkatkan citra dan kualitas profesi dari S1 ke jenjang S2 dan S3 selama menempuh pendidikan, sama sekali tidak tergantung kepada beasiswa pemerintah. Namun ternyata penulis dapat meningkatkan kualitas pendidikan formal tanpa kesulitan pendanaan yang berarti.

Tulisan ini mengarahkan pembaca terutama guru untuk menggodok diri secara aplikatif, secara praktis, dan simpel bagaimana cara menjadikan profesi keguruan itu dapat diraih

tanpa mengorbankan citra dan harga diri dengan melakukan pekerjaan sampingan yang tidak ada keterkaitan dengan profesi. Kiat dan Tips menjadi guru profesional dan berjiwa profesi sekaligus mampu menyejahterakan diri menjadi guru berkualitas, mandiri dan bercitra tangguh dalam profesi. Langkah itu kiranya penting dilakukan. Karena penulis lihat kunci sukses pendidikan dan pengkaderan siswa berkualitas tergantung pada guru. Bagaimana guru memerankan dan memungsikan diri agar kualitas prima didapat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (siswa). Langkah praktis itulah yang mau dibangun.

Problematika pendidik (guru) profesional dalam dinamika lembaga pendidikan perlu dijadikan satu kerangka acuan atau panduan profetik bagi guru atau tenaga pendidik lainnya. Permasalahan bahasan tulisan ini, berkisar gambaran umum pola tenaga pendidik, problematika tenaga profesi guru, kiat atau tips guru menjadi profesional, dan tantangan profesi guru era dunia multimedia dan penutup.

Acuan untuk meningkatkan profesionalisme guru di dalam buku ini ada yang dijelaskan bersifat praktis dan dapat dipraktikkan, tetapi ada juga yang bersifat teoritis dan wacana yang sebagian sebagai upaya untuk mencerahkan strategis menuju kecintaan terhadap lapangan pekerjaan sebagai guru, baik yang berlabel PNS maupun guru honor aau guru swasta. Kalau seorang guru mau benar-benar mencintai posisi pekerjaannya, kendati tidak menjadi pegawai negeri sekalipun, dia tetap menjadi guru yang dicintai dan memosisikan pekerjaannya tetap diminati dan guru yang bersangkutan tetap sejahtera dalam kariernya. Langkah-langkah menuju ke arah guru profesional itulah yang akan menjadi isi buku ini.

2

Gambaran Guru di Indonesia Dewasa Ini

A. Pembaruan Pendidikan dan Tenaga Pendidik (Guru)

Reformasi yang digulirkan bangsa Indonesia melalui gerakan mahasiswa sejak 1998 hingga saat ini belum menuai hasil yang memuaskan. Masih banyak kita jumpai berbagai masalah dan krisis yang tak kunjung reda. Memang diakui dampak reformasi ialah membuka kran demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, dengan modal kebebasan berpendapat saja tidak cukup untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat yang mau keluar dari krisis, bahkan kayaknya kondisi kemanusiaan kini semakin terpuruk. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, KKN, dan kekerasan secara individu ataupun kelompok belum dapat selesai secara merata.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia yang

masih rendah. Kualitas SDM yang rendah, baik secara akademis maupun non akademis.

Menilai kualitas SDM suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa Indonesia tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia ditentukan oleh pendidikan. Mereka menganggap kebodohan adalah musuh kemajuan kejayaan bangsa, karenanya, hal itu perlu diperangi dengan mengadakan revolusi pendidikan. Pengalaman beberapa negara dapat dijadikan pelajaran. Ketika bangsa Jepang hancur akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 menerapkan pendekatan pembangunan menuju kejayaan, Jepang kembali dengan memprioritaskan pembangunan pendidikan. Pendidikan adalah jalan menuju kemakmuran dan kemajuan serta eksistensi suatu negara. Manusia merupakan pelopor pembangunan dan karenanya investasi dalam SDM merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Untuk itu setiap negara yang ingin maju dan berkembang haruslah berupaya membuat pendidikan itu efektif. Pendidikan harus mampu berfungsi mengubah sikap mental yang kolot dan mampu menggalakkan inovasi dalam memengaruhi secara kreatif pola dan perilaku masyarakat (Seda, 1970) dalam Sani (2006).

Pernyataan pendidikan adalah kunci modernisasi investasi manusia memperoleh pengakuan dan banyak kalangan ahli. Jika tidak mampu mengembangkan SDM, suatu bangsa tidak akan dapat membangun negaranya. Oleh karena itu, pengembangan pembangunan SDM merupakan salah satu syarat yang penting bagi pembangunan. Dalam sejarah perkembangan ekonomi di banyak negara industri terlihat bahwa kualitas SDM dalam pembangunan yang dikenal dengan istilah *human resources based economic development*, telah mengantarkan negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan,

Singapura menjadi negara-negara industri maju (Suharno, 2004) dalam Sani (2006).

Para ahli mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad iptek dan informasi karena menjadi landasan utama menuju kekuatan kualitas hidup sebagaimana dikutip pernyataan Naisbitt (1995) ada 10 kecenderungan besar yang akan terjadi pada pendidikan di abad ke-21, yaitu (1) perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi (2) teknologi rendah dipaksakan ke teknologi tinggi, (3) ekonomi nasional ke ekonomi dunia, (4) perencanaan jangka pendek ke perencanaan jangka panjang, (5) sentralisasi ke desentralisasi (6) demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatif (7) hierarki ke penjaringan, (8) utara ke selatan (9) dan pilihan tunggal ke pilihan majemuk

Memperhatikan pendapat di atas jelas akan ada perubahan orientasi pendidikan, terutama munculnya pembaruan secara total masalah pendidikan di abad pengetahuan, menuntut adanya manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bernalansa pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian dini, komunikasi, dan keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah sosok penampilan guru yang diandalkan dengan keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesionalisme, kerja sama serta belajar meningkatkan citra diri dengan berbagai disiplin, wawasan masa depan, kepastian karier, dan kesejahteraan lahir batin. Pendidikan mempunyai peranan yang amat strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan

dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai multi-skills yang mantap. Untuk itu, lembaga pendidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan pencerahan dan pemberdayaan dalam berbagai aspeknya.

Munculnya anggaran pendidikan khususnya untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran di sekolah bersumber dana APBN dan APBD provinsi, kabupaten/kota dan dana lain yang bersumber non-belanja Negara relatif masih kecil, meskipun dalam amanat UUD 1945 yang telah diamandemen bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari keseluruhan anggaran Negara. Itu pun pemerintah seakan masih maju-mundur dalam penetapannya.

Kebijakan perubahan kurikulum oleh lembaga belum mampu dan tidak dikaji dan diuji guru atas dasar kebutuhan (*need assessment*) di lapangan, tetapi atas dasar kira-kira, dan kemauan kaum birokrasi masih dipertanyakan komitmen serta upaya keseriusannya.

Menurut Sani [2006] bahwa guru juga tidak mampu melihat posisi *marketable* (posisi kebutuhan pasar) atau pasar kerja bagi lulusan sekolah khususnya guru sekolah menengah kejuruan selalu yang seyogiannya jangan hanya berangan tentang kualitas atau menanti hasil kualitas, justru perlu melakukan tindakan nyata. Namun apa yang terjadi?, Ternyata penyerapan lulusan keguruan setiap tahunnya selalu seret karena, kompetensi lulusan tidak memadai secara mutu dan skill, sehingga setiap tahun angka pengangguran lulusan sekolah menengah terus bertamhah. Berarti dalam kaitan ini guru seakan gagal menciptakan kualitas siswa.

Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan internet

sehingga bangsa kita menjadi sangat tergantung kepada bangsa Barat dalam hal teknologi dan informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadli semacam virtual enemy yang telah masuk ke seluruh pelosok di dunia. Semua tantangan itu menuntut pendidikan SDM Indonesia, terutama generasi muda agar meningkatkan serta memperluas pengetahuan, wawasan keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif), keahlian yang profesional serta keterampilan dan kualitas skill-nya.

Penyempurnaan sistem pendidikan menitikberatkan pada beberapa orientasi, yaitu: *Pertama*, pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan yang mumpuni; *kedua*, pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun secara gratis yang konsekuen; *ketiga*, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pada kompetensi; *keempat*, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka; *kelima*, peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan; *keenam*, penyediaan sarana belajar yang memadai; *ketujuh*, pembiayaan pendidikan yang berkeahlian; *kedelapan*, pembiayaan penuh dari masyarakat; *kesembilan*, pengawasan, evaluasi, dan akreditasi pendidikan (Direktorat Menengah Umum Depdiknas, 2007).

Secara khusus, pemicu perubahan dalam lingkungan pendidikan dan respons atas perubahan dapat dikalkulasi (dihitungkan) sebagai berikut [Sani, 2006].

1. Globalisasi menyebabkan informasi bergerak amat cepat dan tanpa batas. Materi pembelajaran yang selama ini menjadi otoritas dan penguasaan guru kini dapat diakses oleh siapa saja termasuk para siswa melalui internet. Sumber belajar pun tersedia amat luas tidak hanya terbatas pada buku teks. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan kompetensi sumber daya pendidikan.

2. Kemajuan iptek yang sangat cepat dalam masif menuntut kemampuan sumber daya pendidikan melakukan penyesuaian yang signifikan.
3. Mobilitas tenaga kerja baik yang profesional maupun pekerja teknis pada tataran internasional yang gerakannya melintasi batas negara menuntut pendidikan semakin dikelola secara bermutu.
4. Krisis multi dimensional mendorong dunia pendidikan untuk dapat semakin memperkuat diri, yang dikelola secara lebih efisien dengan makin terbukanya akuntabilitas tinggi sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta mendorong terbukanya mobilitas vertikal SDM.
5. Desentralisasi pendidikan sebagai konsekuensi logis dan pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan komunikasi kepala sekolah dengan pihak-pihak lain seperti Pemenintah Daerah dan stakeholders lainnya.
6. Pendanaan dan komitmen peningkatan anggaran pendidikan dan pemerintah yang masih rendah, demikian pula partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang belum mendorong warga sekolah dan diharapkan pihak sekolah pun tak henti-hentinya mengupayakan lahirnya kreativitas dan inovasi dalam percepatan tercapainya program-program sekolah yang terus berkembang.
7. Etos kerja tenaga kependidikan masih rendah sehingga menghambat percepatan penguasaan kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Kembali kepada posisi guru sebagai bagian inti dalam posisi pendidikan secara nasional praktik pembelajaran guru yang terjadi sekarang masih didominasi oleh pola lama yaitu paradigma sebagaimana dijumpai di abad klasik di era industri. Pada abad pengetahuan cara lama yang digunakan justru sangat jauh berbeda dengan pola pada abad modern. Gaibreath (1999) dalam Sani [2006] mengemukakan bahwa pendekatan guru pembelajaran abad pengetahuan adalah campuran, yaitu perpaduan antara pendekatan belajar dan guru berperan setralistik dan subyektif, belajar hanya milik siswa, dan siswa satu sama lain sebagai obyek bukan tim. Belajar cenderung hanya ada pada sendiri. Praktik pembelajaran amat terfokus pada pengetahuan tekstual.

B. Peran Guru dalam Pendidikan



Peran guru mendorong siswa aktif dalam pembelajaran.

Peran guru dalam pola pendidikan nasional memiliki empat krisis pokok, yakni kuantitas secara umum, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan akurasi manajemen. Lebih

inci dinyatakan bahwa ada tujuh masalah pokok dalam sistem pendidikan dan pembelajaran umum yang jadi problematika lingkaran setan dunia pendidikan, sebagaimana disinyalir Tilaar (2001) bahwa pendidikan nasional, (1) terjadi penurunan akhlak dan moral peserta didik; (2) pemerataan kesempatan belajar yang belum merata secara standar kualitas; (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan; (4) status kelembagaan yang lemah (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan slogan pembangunan nasional; (6) sumber daya manusia yang belum profesional.

Menggaris-bawahi point penting dalam skala pendidikan yang notabene ada pada lembaganya maka ujung tombak secara tepat dalam kesuksesan penanganan pendidikan tidak bisa dipisahkan oleh kekuatan dan kewenangan guru di sekolah dan tenaga pendidik secara umum di lembaga pendidikan.

Paradigma pendidikan lama, bahwa posisi mereka tidak ubahnya sebagai buruh dan tenaga kerja umum dalam lapangan pekerjaan. Dengan demikian pekerjaan guru bukan menjadi sebuah panggilan jiwa dan tuntutan profesi mulia. Paradigma lama profesi dan peran guru hanya sekadar memenuhi lapangan pekerjaan. Karena selama ini pandangan guru sebagai “buruh” diciptakan oleh pemerintah. Mengingat dalam status perbedaan penggajian dan lapangan kerja tidak jauh beda dengan pekerjaan PNS atau pekerja swasta. Pemerintah tidak meniupkan roh dan jiwa profesi guru sebagai sebuah panggilan kemuliaan. Bayangkan guru hanya mendapatkan standar UMR. Kalau pun ada kelebihan tunjangan, itu pun seakan terpaksa dilakukan pemerintah. Sehingga tingkat kesejahteraan guru, berada pada posisi seadanya saja. Penghargaan profesi seperti ini perlu diperbaharui terus menerus untuk memunculkan sikap spiritualitas guru sebagai tenaga profesional.

Guru dalam pandangan pendidikan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran di sekolah tidak serta merta selalu pada posisi lemah dan pembiayaan mereka di dalam anggaran sangat tergantung pada sumber-sumber dana seperti APBN atau APBD kabupaten/kota dan provinsi maupun yang selama ini masih kecil. Kebijakan perubahan kurikulum tidak diuji atas dasar kebutuhan (*need assessment*) di lapangan, tetapi hanya atas dasar kajian, perkiraan dan kemauan birokrasi dengan mendapat perubenanaran oleh para pakar yang ditunjuk oleh birokrasi tersebut.

Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan internet sehingga bangsa kita menjadi sangat tergantung kepada bangsa Barat dalam hal teknologi dan informasi. Inilah yang berbentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam virtual enemy yang telah masuk ke seluruh pelosok di dunia ini. Semua tantangan itu menuntut SDM Indonesia, terutama generasi muda agar meningkatkan serta memperluas pengetahuan, wawasan keunggulan (baik komparatif maupun kompetitif), keahlian yang profesional serta keterampilan dan kualitasnya.

C. Realitas Problematika Guru

Melihat realitas di atas diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, terus sama arus globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan pendidikan di sekolah bukanlah merupakan satu-satunya pangkalan ilmu pengetahuan.

Menurut Imron yang dikutip dari Zamroni (2002) dalam Sani (2006) pembangunan pendidikan harus mengantisipasi kecenderungan global yang akan terjadi. Beberapa kecenderungan yang dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal yaitu: (1) proses investasi dan reinvestasi; (2) perkembangan industri, komunikasi, dan modernisasi; (3) pergeseran pendidikan dan *back to basic* ke arah *the Joint to future basic*, yang mengandalkan pada peningkatan kemampuan kreativitas kekuatan skill mumpuni dalam kehandalannya; (4) berkembang dan meluasnya ide demokratisasi yang memunculkan tuntutan pelaksanaan *school based management* dan *site specific solution*; dan (5) menuntut secara pemecahan masalahnya dalam *sistem analisis*, bukan hanya mengandalkan analisis sebab akibat. “Mampukah praktik pendidikan kita menghasilkan lulusan dengan kualitas yang memadai untuk menghadapi kecenderungan di atas?”

Di samping itu, pendidikan kita bersifat *melankolik* (semacam tidak ada irama nada), yang tercermin dengan seringnya perubahan kurikulum secara erotik (dalam kacamata pandang apa adanya). Masih ditambah lagi, banyaknya guru yang tidak atau belum mampu mengaitkan mata pelajaran yang diajarkan dengan fenomena sosial yang dihadapi masyarakat sehingga guru hanya terpaku pada pemikiran sempit. Terbatasnya wawasan para guru dalam memahami fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat menyebabkan kurang tepat dan kurang pekanya mereka mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan. Akibatnya mereka kehilangan arahan tentang peta pendidikan dan upaya menghadapkan kebutuhan realitas kemasyarakatan secara komprehensif.

Kesenjangan okupasional, yaitu kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukanlah semata-mata disebabkan oleh dunia pendidikan itu sendiri, melainkan juga ada yang datang dari faktor dunia kerja itu sendiri. Jumlah antara angkatan kerja (lulusan sekolah) dengan pencari lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang.

Kesenjangan kultural lebih ditunjukkan pada ketidakmampuan peserta didik memahami persoalan yang sedang dihadapi dan dirasakan masyarakat di masa kini dan mendatang. Kesenjangan kultural ini sebagai akibat sekolah tidak manipu memberikan kesadaran tinggi kepada peserta didik. Peserta didik kita tidak lagi memiliki kepedulian dan kepekaan sejarah dan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini. Di samping masih terwarisi "mental priyayi" di kalangan guru kita, yaitu mereka dalam bekerja selalu berada pada posisi ingin dihormati dalam profesinya, padahal penghormatan bukan bagian dari sosok profesionalisme, melainkan hanya satu sentuhan bahwa guru memang wajar dihormati dari sisi ilmunya memilih jenis pekerjaan lebih berorientasi pada white color (Suharno, 2004) dalam Sani (2006).

Menurut Dapir sebagaimana dikutip dari Suharno (2004) dalam Sani (2006) telah diprediksikan bahwa hasil pendidikan tradisional semacam itu, dihasilkan oleh guru kini yang banyak memiliki masalah dalam kehidupan profesinya hanya akan menghasilkan lulusan yang nienjadi pengikut pemimpin. Jenis pekerjaan yang menekankan pilihan posisi formal, bukan pekerjaan yang memerlukan banyak inisiatif, kreativitas, dan entrepreneurship. Kesenjangan antara ilmu pengetahuan yang dapat diberlakukan sebagai investasi benefit bagi sekolah yang kuat dalam penguatan ilmu (*school knowledge*

basic) dan pengetahuan yang tergalai untuk bermanfaat buat kebutuhan di luar sekolah (*out of school knowledge*) sernakin melebar. Pendidikan masa kini dan yang akan datang dihadapkan pada tantangan yang sangat berat sebagai akibat adanya terobosan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Menurut Gardner (2000) dan Naisbitt (1996) dalam (Hayat, 2005), arah dan pendekatan pendidikan manusia telah mengalami pergeseran yang tidak dapat dielakkan. Beberapa pergeseran arah dan pendekatan tersebut, baik yang bersifat filosofis, substantif (isi pendidikan), maupun pedagogis (proses pendidikan) mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut.

1. Peran guru sebagai *knowledge agent* bergeser menjadi *learning agent*, yang mendorong, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk mengalami proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, potensi, perkembangan fisik, dan psikologinya. Dalam hal ini dibutuhkan sosok guru yang mampu memahami potensi peserta didik dengan baik sehingga mampu melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
2. Proses pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kebiasaan dan cara berpikir (*habits of mind*) peserta didik didominasi oleh cara kerja komputer. Cara berpikir prosedural yang bersifat eksplisit dan tepat akan diperkuat, sementara aspek perimbangan estetika dan etika dimarginalisasi. Karena guru harus mampu mengimbangi keadaan didik mempunyai keseimbangan antara berpikir logika dan etika serta estetika.

3. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan dilakukannya proses pendidikan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan tahapan penguasaan peserta didik. Guru harus mampu mengemas teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang berbasis individual sehingga peserta didik mampu berkembang secara maksimal.
4. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik akan dapat meleak budaya (*cultural literacy*) secara instant. Dengan bantuan teknologi komputer, peserta didik dapat dengan cepat mengakses segala informasi di dunia yang diperlukan. Peserta didik tidak lagi memerlukan waktu yang lama untuk mencari informasi tentang demografikal Korea, Gurun Sahara, dan kehidupan di Antartika. Semua informasi tersedia dan tersaji di hadapan peserta didik sebagai kenyataan maya (*virtual reality*).
5. Perkembangan ilmu komputer yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan realitas maya (*virtual reality*) telah membayangi proses pendidikan, di mana program pendidikan yang semula dirancang dan dilakukan oleh manusia digantikan oleh perangkat lunak yang dirancang oleh manusia. Proses pembelajaran interaktif yang mirip dengan interaksi manusia dapat dilakukan dengan perangkat lunak yang berbasis kecerdasan buatan.
6. Pendidikan yang secara konvensional diarahkan agar lulusan lembaga pendidikan dapat memperoleh pekerjaan reguler selama masa dewasanya secara produktif dianggap telah mengurangi kelenturan pasar kerja.

Dari cakupan di atas bahwa kemampuan adaptif guru dalam kondisi ini akan melahirkan upaya problem solving terhadap realitas profesinya. Problematika pendidikan secara umum yang dihadapi guru bukan hanya dipecahkan oleh guru yang bersangkutan, tetapi juga guru yang bersangkutan hendaknya berupaya memecahkan problematika kehidupannya sendiri. Secara dewasa guru yang arif melihat bahwa keberadaannya jangan menjadi benalu bagi profesinya.

D. Perbaikan Proses Profesionalisme Guru

Menurut Garvin (2005) dalam Sani (2006), sekolah sebagai organisasi pembelajaran bertumpu pada lima aktivitas utama berikut. Pemecahan masalah secara sistematis. Dalam mengidentifikasi dan merumuskan serta memecahkan setiap masalah yang muncul, sekolah menggunakan pola berpikir ilmiah dengan dukungan data empirik yang tersedia. Selanjutnya, kita harus selalu belajar dari pengalaman. Bahwa lembaga pendidikan, sekolah selalu mengkaji keberhasilan dan kegagalan yang diraihinya, misalnya secara sistematis dan mencatat serta menjadikan pelajaran terpetik tersebut sebagai pengetahuan bersama warga sekolah. Kegagalan masa lalu yang dialami sekolah menjadi pelajaran agar tidak terulang dan menjadi pijakan untuk mencari alternatif lain. Akumulasi pengalaman dijadikan bahan untuk selalu mencari terobosan yang lebih inovatif. Belajar dari pihak/orang lain. Sekolah perlu melakukan perbandingan dengan sekolah atau lembaga lain untuk memperoleh perspektif baru. Keberhasilan yang dilakukan lembaga lain dapat dijadikan masukan untuk perbaikan dan alat ukur konsep desain terapi *learning* dalam

mencuri gagasan pihak/orang lain tanpa malu-malu, merupakan sikap yang sangat penting dalam proses jati diri keunggulan sekolah.

Proses pemindahan ilmu pengetahuan, dimana transfer pengetahuan perlu dilakukan. Agar pembelajaran terjadi pada semua warga sekolah, pengetahuan baru harus disebarkan secara cepat dan efisiensi pada warga sekolah. Gagasan baru akan mempunyai dampak yang maksimal bagi perubahan apabila dipahami secara meluas dan mendalam oleh semua warga sekolah.

Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional [2006] dalam rencana strateginya menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan adalah:

1. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. satu kesatuan yang sistemik sistem terbuka dan multi-makna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Abad Industri	Abad Pengetahuan
Guru sebagai pengarah	Guru sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan
Guru sebagai sumber pengetahuan	Guru sebagai kawan belajar
Belajar diarahkan oleh kurikulum.	Belajar diarahkan oleh siswa
Belajar dijadwalkan secara ketat dengan waktu yang terbatas	Belajar secara terbuka, ketat dengan waktu yang terbatas fleksibel sesuai keperluan
didasarkan pada fakta	Berdasarkan masalah
Bersifat teoretik, prinsip dan survei	Dunia nyata, refleksi prinsip dan survei
Pengulangan dan latihan	Penyelidikan dan perancangan
Aturan dan prosedur	Penemuan dan penciptaan
Kompetitif	Kolaboratif
Berfokus pada kelas	Berfokus pada masyarakat
Hasilnya ditentukan sebelumnya	Hasinya terbuka
Mengikuti norma	Keanekaragaman yang kreatif
Komputer sebagai subjek belajar	Komputer sebagai peralatan jenis ajar
Presentasi dengan media	Interaksi multimedia yang dinamis
Komunikasi sebatas ruang kelas	Komunikasi tidak terbatas
Tes diukur dengan norma	Unjuk kerja diukur oleh, kawan sebaya, dan diri sendiri.

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional [Dalam Sani, 2006]

3

Guru dalam Profesi dan Tantangan Masa Depan

A. Guru di Lintasan Sejarah atau Dilindas Sejarah

Jika kita menyoal dan berbicara guru atau tenaga kependidikan, maka dalam semua rentang waktu lama dan sejak dikenal budaya persekolahan atau bahkan sejak sepak terjang sejarah manusia, selalu jadi bagian penting dalam peradaban manusia. Tentu tidak pada tempatnya dijawab di sini, karena memerlukan ratusan atau bahkan ribuan halaman. Hanya sekilas kita berbicara sejarah posisi guru.

Guru selalu terlibat dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban, sejak kapan dan waktu yang tepat, muncul keberadaan guru atau sebutan guru dimaksud? Pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban mendasar pula. Guru lahir dan ada semenjak manusia itu ada di muka bumi. Karena begitu manusia itu ada dalam kehidupan, sesungguhnya proses pendidikan itu terjadi. Proses pendidikan dalam arti proses internalisasi dan sosialisasi suatu nilai dan orang dewasa kepada orang yang dianggap perlu menerima suatu nilai.



Guru pemberi semangat bagi siswanya.

Dalam pembahasan ini tentu tidak akan dibahas bagaimana proses pendidikan itu berlangsung dan bagaimana peran pendidik (guru) dalam proses tersebut dan satu zaman ke zaman lain. Tulisan ini akan difokuskan pada bagaimana peranan guru Indonesia dalam bingkai sejarah Negara Republik Indonesia, dan masa penjajahan sampai ke alam kemerdekaan dengan berbagai situasi dan kondisi.

1. Peran Guru di Era Pra-kemerdekaan

Pada masa penjajahan guru tampil dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia tercermin dan terpatrit dari para guru pada masa penjajahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dan lahirnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini merupakan kumpulan dan guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah.

Dengan semangat perjuangan dan kebangsaan yang menggelora, para guru pribumi menuntut persamaan hak dan kedudukan dengan pihak Belanda. Sebagai salah satu bukti dan perjuangan ini adalah Kepala HIS yang sebelumnya selalu dijabat oleh orang Belanda, bergeser ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan guru terus bergelora dan memuncak serta mengalami pergeseran cita-cita perjuangan yang lebih hakiki lagi, yaitu Indonesia merdeka.

Pada tahun 1932 Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini merupakan suatu langkah berani dan penuh risiko, karena mengusung nama "Indonesia" di mana Belanda tidak suka dengan kata tersebut yang dianggap mengobarkan semangat kebangsaan. Namun, dengan semangat nasionalisme yang tinggi serta dorongan untuk hidup merdeka menjadikan organisasi ini tetap eksis sampai pemerintahan kolonial Belanda berakhir.

Ketika pemerintahan kolonial Jepang berkuasa, segala organisasi yang dianggap membahayakan keberadaan pemerintah kolonial Jepang dilarang, termasuk Persatuan Guru Indonesia (PGI). Praktis selama pemerintahan kolonial Jepang PGI tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan terbuka.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa peran guru pada masa penjajahan sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Dengan peran guru sebagai pengajar dan pendidik yang berhadapan langsung dengan para siswa, maka guru bisa secara langsung menanamkan jiwa.

2. Peran Guru di Era Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadikan peran guru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat lebih terbuka dan maksimal. Dengan semangat proklamasi para guru bersepakat menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia yang berlangsung tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Dalam kongres tersebut disepakati untuk menghilangkan segala perbedaan latar belakang yang ada pada guru, seperti perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, daerah asal, politik, agama, dan suku. Mereka melebur dalam semangat keindonesiaan dan siap mengabdikan demi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Melalui kongres ini didirikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tepatnya tanggal 25 November 1945.

PGRI lahir dalam suasana revolusi di mana bangsa Indonesia masih menghadapi sekutu yang ingin mengambil alih kembali Indonesia merdeka. Melalui siaran RRI Surakarta, para guru bersatu dan siap mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan: (1) mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia; (2) mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan; (3) membela hak dan nasib buruh umumnya, dan guru pada khususnya. Dan tiga tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa PGRI sangat serius terhadap masalah nasib bangsa ke depan menuju Indonesia merdeka yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dengan Kongres Guru Indonesia, maka semua guru yang ada di Indonesia melebur dan menyatu dalam suatu wadah atau Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kini tidak ada lagi sekat-sekat guru karena perbedaan latar belakang

guru. Melalui nasionalisme menekankan arti penting sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. Responsif artinya guru harus bisa menguasai dengan baik produk iptek, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti pembelajaran dengan menggunakan multi-media. Tanpa penguasaan iptek yang baik, maka guru akan tertinggal dan menjadi korban iptek serta menjadi guru yang “gagap teknologi.”

3. Nilai Keguruan dalam Keterlindasan Sejarah Pasca-Kemerdekaan

Guru dalam lintasan sejarah keberadaan bangsa ini memang dalam posisi kelam, terutama eksistensi moral, sosial dan keadilan dalam menikmati kesejahteraan profesi. Akibat lebih jauh, pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas kini sudah bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi di kalangan anak didik yang notabene didik formal oleh guru. Sekarang muncul semacam perubahan dahsyat dan sangat begitu terasa akan pengaruh iptek dan globalisasi. Pengaruh hiburan baik media cetak maupun media elektronik yang menjurus pada hal-hal pornografi telah menjadikan anak tergoda dengan kehidupan yang menjurus dalam pergaulan bebas dan materialisme. Mereka sebenarnya hanya menjadi korban dan globalisasi yang selalu menuntut kepraktisan, kesenangan belaka (hidoisme) dan daya budaya kilat dalam melakukan tindakan. Guru telah menjadi kambing “kelabu” atau semi hitam dan sebagian kerusakan generasi siswa.

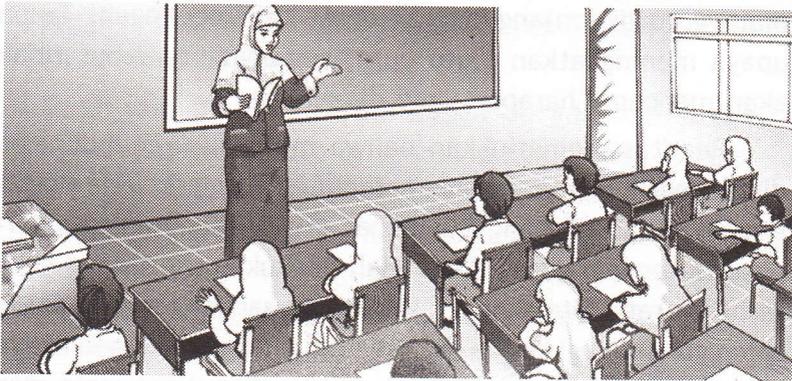
Krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa di dunia membutuhkan identitas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dan warga negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan untuk tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dan warga negara akan mendorong jiwa berkorban untuk bangsa dan negara sehingga akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Dewasa ini ada kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dan beberapa indikator, seperti kurang apresiasinya generasi muda pada kebudayaan asli bangsa Indonesia, pola dan gaya hidup remaja yang lebih kebarat-baratan, dan beberapa indikator lainnya. Melihat realitas di atas guru sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya perdagangan bebas, baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik, maupun dunia. Kondisi di atas membutuhkan kesiapan yang matang terutama dari segi kualitas sumber daya manusia. Dibutuhkan SDM yang handal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan SDM yang digambarkan seperti di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang visioner, kompeten, dan berdedikasi tinggi sehingga mampu membekali peserta didik dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang sedang dan terus berubah.

B. Mengubah Paradigma Peran Guru

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru herhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar.



Guru berhadapan langsung dengan siswa.

Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, *skill* (keahlian), kemandirian emosional, dan moral serta spiritual. Dengan demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Apalagi dalam perubahan kurikulum yang menekankan kompetensi, guru memegang peranan penting terhadap implementasi KTSP, karena gurulah yang pada akhirnya akan melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Guru adalah

kurikulum berjalan Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, sebaik apa pun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh mutu guru yang memenuhi syarat, maka semuanya akan sia-sia (*Kompas*, 15 April 2004). Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak cukup dengan pembenahan di bidang kurikulum saja, tetapi harus juga diikuti dengan tingkatan mutu guru di jenjang tingkat dasar dan menengah. Tanpa upaya meningkatkan mutu guru, semangat tersebut tidak akan mencapai harapan yang diinginkan.

Realitas menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. *Input* guru di Indonesia sangat rendah. Bila Balitbang Depdiknas (1999) menunjukkan dari peserta tes lain guru PNS setelah dilakukan tes bidang studi ternyata rata-rata skor tes seleksinya sangat rendah. 6.164 calon guru biologi ketika dites Biologi rata-rata skornya hanya 44,96; dan 46 calon guru Kimia ketika dites Kimia rata-rata skornya hanya 5,55; dari 7.558 calon guru Bahasa Inggris rata-rata skornya hanya 7,57; dari 7.863 calon guru Matematika ketika dites Matematika rata-rata skornya hanya 27,67; dan dari 1.764 calon guru Fisika ketika dites Fisika rata-rata skornya hanya 27,35. Data Balitbang Depdiknas tahun 2001 juga menunjukkan guru SD (negeri dan swasta) yang dinilai layak mengajar hanya 38 persen dan 1.141.168 guru se-Indonesia. Begitu pula untuk jenjang menengah, jumlah guru yang dinilai layak mengajar masih di bawah 70 persen (*Kompas*, 25 Januari 2004).

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner

dan mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik, Apa yang dikenal dengan sebutan “*Quantum Learning*” dan “*Quantum Teaching*”, pada hakikatnya adalah mengembangkan suatu model dan strategi pembelajaran yang seefektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna [Sani, 2006].

Di lain pihak para guru juga berada dalam suasana lingkungan yang kurang menyenangkan dan sering kali terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma (pola pikir) guru, dan pola pikir tradisional menuju pola pikir profesional. Apalagi lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen menuntut sosok guru yang berkualifikasi, berkompetensi, dan bersertifikasi. Guru menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangkan. Guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir sehingga memiliki wawasan yang luas dan tidak tertinggal dengan informasi terkini. Guru mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas dengan selalu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan mempunyai integritas yang tinggi. Guru mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan zaman sehingga siap menghadapi perubahan dunia yang tak menentu yang membutuhkan kecakapan dan kesiapan yang baik.

4

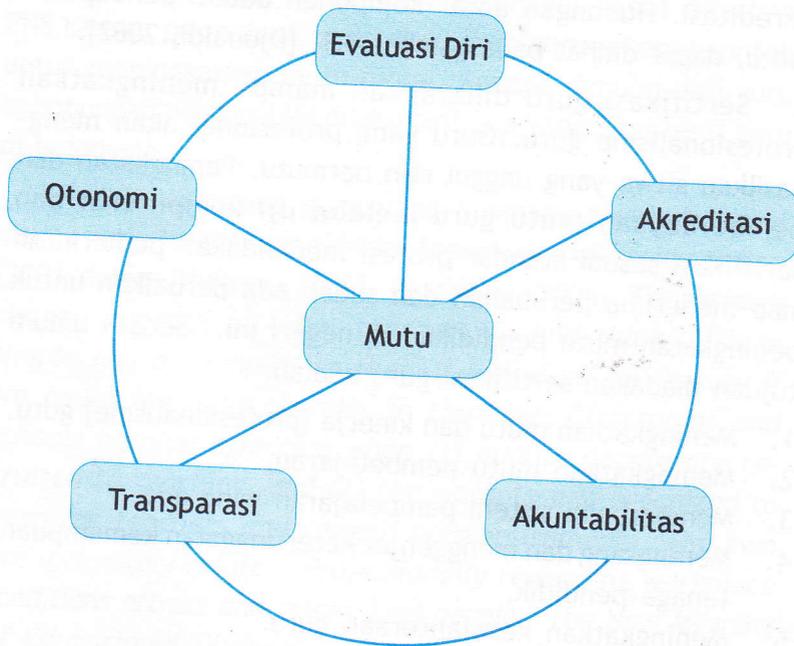
Aspek Ciri Profesional Guru Sekolah Unggul Berkarakter

Dalam rangka menerapkan paradigma baru pendidikan sebagai pola pemikiran terstruktur yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu maka keberadaan guru tidak dapat ditiadakan. Guru yang mempunyai kompetensi dan dedikasi tinggi diperlukan untuk mendukung kemajuan sekolah [Sani, 2006].

Guru juga merupakan aset bangsa, karena menjadikan tonggak bangsa ini semakin kokoh, karena tanpa mereka, semua ini tidak akan berjalan dengan baik. Guru profesional akan membentuk sekolah yang unggul, bermartabat, berkarakter dan memiliki kans, brand image positif bagi lembaga. Indikator keberhasilan jelas secara nyata bisa dirasakan, misalnya lulusan berkualitas, guru profesional, manajemen yang baik, image positif, dan lain-lain.

Keberadaan guru jangan dikesampingkan dan dipandang sebelah mata. Pantaslah guru dijuluki "pahlawan tanpa tanda jasa". Begitu mulia pengorbanannya untuk negeri ini. Mereka sebagai pahlawan bertinta, yang mengorbankan jiwa, tenaga,

waktu untuk pengabdianya pada negeri ini. Maka membicarakan pendidikan yang baik dan unggul berwawasan global tidak mungkin lepas membicarakan tentang eksistensi tenaga pendidik. Kompetensi dan mutu guru jelas berimplikasi pada kesejahteraan mereka. Di Jepang gaji guru 17 juta/bulan, cukup fantastis, di Malaysia 3jt- 4jt/bulan maka pantaslah tanggung jawab dan dedikasinya sesuai dengan profesi yang diemban [Sani, 2006].



Gambar 4-1. Komponen Paradigma Baru

Untuk mencapai keluaran yang bermutu diperlukan, manajemen yang optimal, peserta didik yang unggul, tenaga pendidik yang profesional, fasilitas dan prasarana, proses pembelajaran, metode pembelajaran dan kebijakan yang tepat. Paradigma baru pendidikan sebagai pola pemikiran terstruktur bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Terdapat lima komponen penting dalam pencapaian mutu, yaitu komponen yang saling berinteraksi sinergis dalam pencapaian mutu [Djunaidi, 2002]. Kelima komponen tersebut adalah evaluasi diri, otonomi, transparansi, akuntabilitas dan akreditasi. Hubungan antar komponen dalam pencapaian mutu, dapat dilihat pada gambar 4-1, [Djunaidi, 2002].

Sertifikasi guru diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru. Guru yang profesional akan menghasilkan siswa yang unggul dan bermutu. Peningkatan dan pemberdayaan mutu guru melalui uji kompetensi dan sertifikasi sesuai standar profesi menandakan pemerintah siap menerima perubahan dan sudah ada perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan di negeri ini. Secara umum tujuan diadakan sertifikasi guru adalah:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja [profesionalisme] guru,
2. Meningkatkan mutu pembelajaran,
3. Memperbaiki sistem pembelajaran yang ada,
4. Merangsang dan menggenjot ketertinggalan kemampuan tenaga pendidik,
5. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Usaha pemerintah dalam memfasilitasi sertifikasi guru dan dosen ditanggapi beragam. Bagi sebagian tenaga pendidik, sertifikasi dipandang tumpang tindih dengan kepemilikan Akta

IV dan Akta V, oleh karena itu sertifikasi akan menjadi tidak relevan bila citra terhadap para guru tidak direformasi.

Kesejahteraan guru yang kurang akan berakibat pada peningkatan mutu peserta didik. Coba dibayangkan gaji guru wiyata bakti SLTP dan SMU tiap bulan berkisar Rp100.000 - Rp200.000, bahkan wiyata bakti di TK dan SD sekitar Rp75.000-Rp150.000. Bagaimana mungkin seorang guru bisa profesional mentransfer ilmu. Bahkan sangat ironis lagi, tiap tahun dibutuhkan guru pegawai negeri, tetapi ada guru yang lebih bermutu tidak diterima menjadi PNS, tapi ada guru yang tidak mempunyai kompetensi unggul dapat diterima PNS karena permainan uang. Bukankah guru sebagai contoh untuk meningkatkan mutu moral. Kenapa dimulai dari guru kebohongan pada publik dilakukan? Qua Vadis Eksistensi guru di Indonesia.

Padahal seorang guru yang bermutu menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan. Sesuai yang dikatakan Fullan [2001 dalam Dharma, 2005], [Sugiyono, 2006] *"Educational change depends on what teachers do and think - it's as simple and as complex as that. It would all be so easy if we could legislate changes in thinking. Classrooms and schools become effective when (1) quality people are recruited to teaching, and (2) the workplace is organized to energize teachers and reward accomplishments. The two are intimately related. Professionally rewarding workplace conditions attract and retain good people."* *The New Meaning of Educational Change*".

Berdasarkan data dari Ministry of National Education The Republic of Indonesia [2004] dalam Jalal [2004],

Dilaporkan Tenaga Kependidikan sesuai Tabel 4-2 sampai Tabel 4-5.

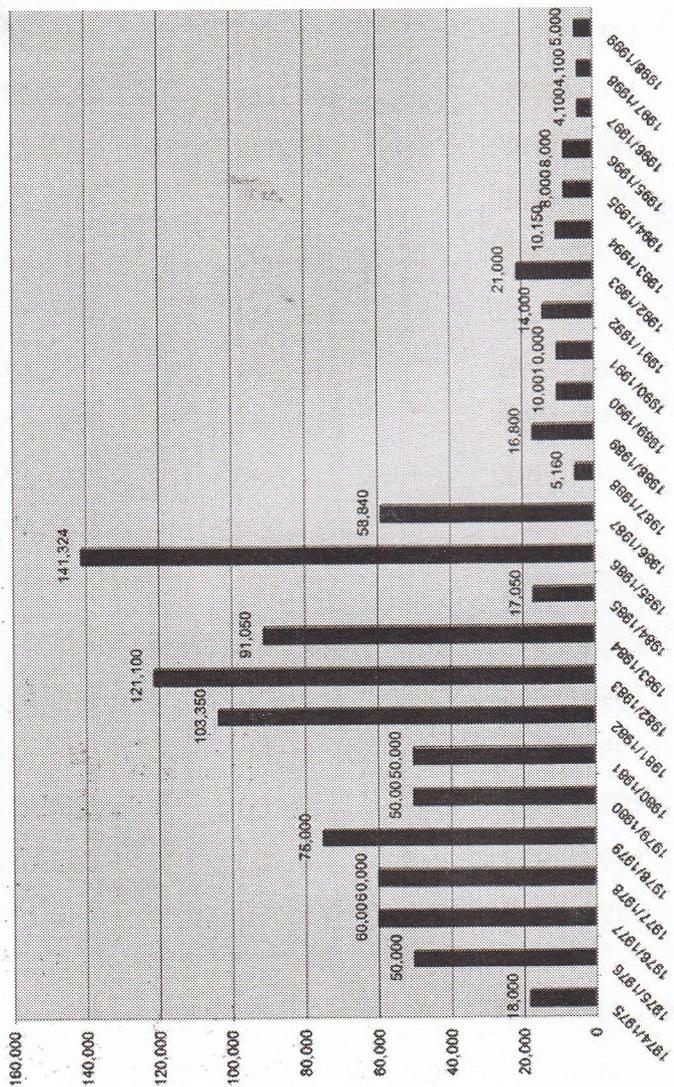
Tabel 4-2. Data Pengangkatan Guru Melalui Program INPRES SD

<i>(Orang)</i>			
No.	Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Komulatif
I	Akhir Repita I 1973/74	18.000	18.000
II	Repita II	263.000	
	1974/1975	18.000	36.000
	1975/1976	50.000	86.000
	1976/1977	60.000	146.000
	1977/1978	60.000	206.000
	1978/1979	75.000	281.000
III	Repita III	415.500	
	1979/1980	50.000	331.000
	1980/1981	50.000	381.000
	1981/1982	103.350	484.350
	1982/1983	121.100	605.450
	1983/1984	91.050	696.500

IV	Repita IV	239.174	
	1984/1985	17.050	713.550
	1985/1986	141.324	854.874
	1986/1987	58.840	913.714
	1987/1988	5.160	918.874
	1988/1989	16.800	935.674
II	Repita V	65.150	
	1989/1990	10.000	945.674
	1990/1991	10.000	955.674
	1991/1992	14.000	969.674
	1992/1993	21.000	990.674
	1993/1994	10.150	1.000.824
III	Repita VI	29.200	
	1994/1995	8.000	1.008.824
	1995/1996	8.000	1.016.824
	1996/1997	4.100	1.020.924
	1997/1998	4.100	1.025.024
	1998/1999	5.000	1.030.024

Sumber: Jalal, 2004.

Tabel 4-3. Grafik Pengangkatan Guru Melalui Program Inpres SD 1974-1999



Sumber: Jatal, 2004.

Tabel 4-4. Kekurangan Guru Tahun 2004-2005

	2004		2005		Kebu- tuhan
	Kebu- tuhan	Pensiun	Kebu- tuhan	Pensiun	
TK	893	187	1.080	260	1.340
SD	63.144	20.399	83.543	23.918	107.461
SMP	57.537	4.707	62.244	6.270	68.514
SMU	26.120	1.498	27.618	1.685	29.303
SMK	9.972	1.073	11.045	1.175	12.220
TOTAL	157.666	27.864	185.530	33.308	218.838

Sumber : Jalal, 2004.

Tabel 4-5. Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelayakan Mengajar 2002/2003

No.	Jenjang Pendidikan		Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
1.	SD	a. Layak	584.395	47,3	41.315	3,3	625.710	50,7
		b. Tidak layak	558.675	45,2	50.542	4,1	609.217	49,3
	Jumlah		1.143.070	92,6	91.857	7,4	1.234.927	100,0
2.	SMP	a. Layak	202.720	43,4	96.385	20,7	299.105	64,1
		b. Tidak layak	108.811	23,3	58.832	12,6	167.643	35,9
	Jumlah		311.531	66,7	155.217	33,3	466.748	100,0
3.	SMA	a. Layak	87.379	38,0	67.051	29,1	154.430	67,1
		b. Tidak layak	35.424	15,4	40.260	17,5	75.684	32,9
	Jumlah		122.803	53,4	107.311	46,6	230.114	100,0
4.	SMK	a. Layak	27.967	19,0	55.631	37,7	83.598	56,7
		b. Tidak layak	20.678	14,0	43.283	29,3	63.961	43,3
	Jumlah		48.645	33,0	98.914	67,0	147.559	100,0

Sumber : Jalal, 2004.

A. Pengertian Profesionalisme Guru

Strategi pencapaian pendidikan nasional kiranya perlu mengarahkan prioritas ujung tombak pendidikan kepada guru. Profesionalisme kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang [Komara, 2006] dalam Sani [2006].

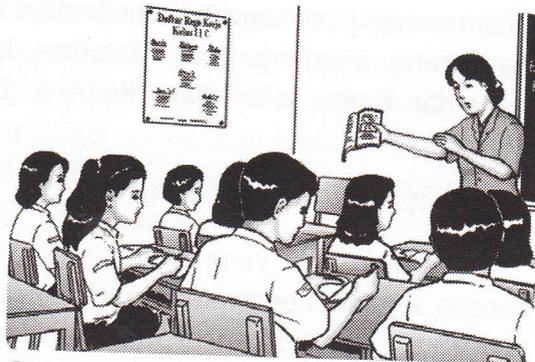
Sementara itu, yang dimaksud profesionalisme adalah kondisi, kualitas suatu keahlian kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.

Pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep (teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2) menekankan suatu keahlian bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; (3) adanya tingkat pendidikan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan pekerjaan yang dilaksanakannya; (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan (Mohammad, 1985) dalam Sani (2006), Komara (2006).

B. Ciri Guru Profesional

Profesor Soedijarto ahli pendidikan juga berpendapat bahwa guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus (*advanced education and special training*), maka guru sebagai jabatan profesional, seperti dokter dan lawyer, memerlukan pendidikan pasca sarjana. Namun, pasca sarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktik. Seperti halnya dokter setelah

menjadi sarjana kedokteran. Di Amerika Serikat, calon guru, baik SD, MI maupun SMA kesemuanya B.A. dan program pasca B.A. (*graduate programe*), tetapi bukan untuk mendapatkan



Guru yang profesional meningkatkan mutu kelulusan.

Master, melainkan untuk mendapatkan “*Credential*” melalui penguasaan ilmu-ilmu keguruan dan praktik keguruan selama satu tahun lebih.

Pemerintah melalui presiden sudah mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Guru sebagai profesi dikembangkan melalui: (1) sistem pendidikan; (2) sistem penjaminan mutu; (3) sistem manajemen; (4) sistem *remunerasi* dan (5) sistem pendukung profesi guru. Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu: (1) membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat (2) meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera dan (3) meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang. Selain itu, diharapkan akan mendorong terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, cangguh, unggul, dan profesional. Guru masa depan diharapkan semakin konsisten

dalam mengedepankan nilai-nilai budaya mutu, keterbukaan, demokratis, menjunjung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari [Komara, 2006].

C. Sikap Guru Profesional

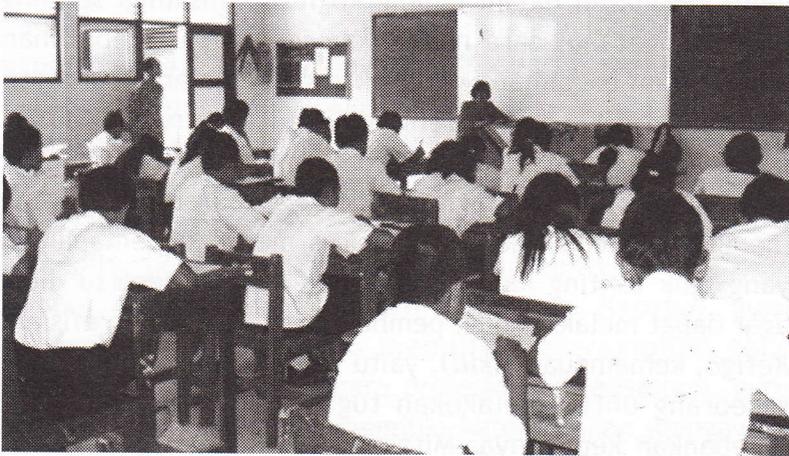
Seorang guru yang profesional jelas akan dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, selalu melakukan pengembangan secara terus-menerus (*continuous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya. Kondisi yang demikian diharapkan mampu menggali potensi dan kreativitas peserta didik (Sidi, 2003) dalam Sani (2006).

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya sertifikasi bagi profesionalis guru, maka guru masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, tetapi beralih sebagai pelatih (*coach*), pembimbing (*counselor*), dan manajer belajar (*learning manager*). Sebagai pelatih, seorang guru akan berperan seperti pelatih olahraga. Mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya, dan membantu siswa menghargai mulai belajar dan pengetahuan. Sementara itu, sikap dan silat-silat guru yang baik adalah (1) bersikap adil (2) percaya dan suka kepada

murid-muridnya (3) sabar dan rela berkorban (4) memiliki wibawa di hadapan peserta didik (5) penggembira (6) bersikap baik terhadap guru- guru lainnya; (7) bersikap baik terhadap masyarakat (8) benar-benar menguasai mata pelajarannya (9) suka dengan mata pelajaran dan (10) berpengatahuan luas (Purwanto, 2002) dalam Sani (2006).

D. Aspek Profesionalisme Guru

Guru profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.



Guru profesional adalah guru yang berkompetensi.

1. Kompetensi

Kompetensi menurut Usman (2005), adalah hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.

Dengan demikian, bahwa pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni: *pertama*, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. *Kedua*, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh

Sementara itu, menurut Finch dan Crunkihon [Sani, 2006] kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Lebih lanjut Gordon dalam Mulyasa, (2005) merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep kompetensi, yakni *pertama*, pengetahuan (*knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, pemahaman (*understanding*) kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien. *Ketiga*, kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Sifat yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, rekan sejawat, dan ilmunya. Menguasai studi yang diajarkan dan mempunyai ketrampilan mengajar (Nurhala dan Radito, 1986) dalam Sani (2006).

E. Peran Guru

Sementara Hamalik (1991), menyatakan bahwa paling tidak, terdapat 13 peranan guru di dalam kelas (dalam situasi belajar mengajar), yakni: *pertama*, guru sebagai pengajar menyampaikan pengetahuan. *Kedua*, guru sebagai pemimpin kelas memiliki keterampilan cara memimpin kelompok siswa. *Ketiga*, guru sebagai pembimbing memiliki keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa. *Keempat*, guru sebagai pengatur lingkungan perlu memiliki keterampilan mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran. *Kelima*, guru sebagai partisipan perlu memiliki keterampilan memberikan saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan. *Keenam*, guru sebagai ekspediter perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan. *Ketujuh*, guru sebagai perencana perlu memiliki keterampilan cara menyampaikan materi secara profesional. *Kedelapan*, guru sebagai supervisor perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan anak dan keterlibatan di kelas. *Kesembilan*, guru sebagai motivator perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi belajar siswa. *Kesepuluh*, guru sebagai penanya perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang merangsang siswa berpikir dan memecahkan masalah. *Kesebelas*, guru sebagai pengajar perlu keterampilan cara memberikan penghargaan

terhadap siswa yang berprestasi. *Keduabelas*, guru sebagai evaluator perlu memiliki keterampilan cara menilai siswa secara objektif, kontinyu, dan komprehensif. *Ketigabelas*, guru sebagai konselor perlu memiliki keterampilan cara membantu siswa yang mengalami kesulitan tertentu.

Dapat disimpulkan, hal ini juga sesuai pendapat Komara [2006] Hamalik, [2002] bahwa seorang guru di dalam menjalankan tugasnya setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap sebagai berikut: *pertama*, menguasai kurikulum. Guru harus tahu batas-batas materi yang harus disajikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik keleluasan materi, konsep, maupun tingkat kesulitannya sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum. *Kedua*, menguasai substansi materi yang diajarkannya. Guru tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan bahan pelajaran yang telah ditetapkan, tetapi guru juga harus menguasai dan menghayati secara mendalam semua materi yang akan diajarkan. *Ketiga*, menguasai metode dan evaluasi belajar. *Keempat*, tanggung jawab terhadap tugas. *Kelima*, disiplin dalam arti luas.

F. Guru Idola Siswa

Menurut beberapa hasil penelitian, bahwa sifat-sifat atau karakteristik guru yang disenangi oleh para siswa adalah guru-guru yang memiliki jiwa (Fitriani, 2006) dalam [Sani, 2006]: (1) demokratis, yakni guru yang memberikan kebebasan kepada anak di samping mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu, tidak bersifat otoriter, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan; (2) suka bekerja sama (kooperatif, guru

yang bersikap saling memberi dan saling menerima serta dilandasi oleh kekeluargaan dan toleransi yang tinggi; (3) baik hati, suka memberi dan berkorban untuk kepentingan



anak didiknya; (4) sabar, yakni guru yang tidak suka marah dan lekas tersinggung serta suka menahan diri; (5) adil, yakni tidak membedakan anak didik dan memberi anak didik sesuai dengan kesempatan yang sama bagi semuanya; (6) konsisten, yakni selalu berkata dan bertindak sesuai dengan ucapannya; (7) bersifat terbuka, bersedia menerima kritik dan saran serta mengakui kekurangan dan kelemahannya; (8) suka menolong, yakni siap membantu anak yang mengalami kesulitan atau masalah tertentu; (9) ramah-tamah, yakni mudah bergaul dan disenangi oleh semua orang, tidak sombong dan bersedia sebagai pendengar yang baik di samping sebagai pembicara yang menarik; (10) suka humor, yakni pandai membuat anak-anak menjadi gembira dan tidak tegang atau terlalu serius; (11) memiliki bermacam ragam minat, artinya dengan bermacam minat akan merangsang siswa dapat melayani berbagai minat anak; (12) menguasai bahan pelajaran yakni dapat menyampaikan materi pelajaran dengan lancar dan menumbuhkan semangat di kalangan anak; (13) fleksibel, yakni tidak kaku dalam

bersikap dan berbuat serta pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (14) menaruh minat yang baik kepada siswa, yakni peduli dan perhatian kepada minat siswa.

G. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah dewasa ini membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang



Guru berkualitas.

Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal berikut.

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1).
2. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 28 ayat 1).
3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian

- yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2).
4. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; (d) kompetensi sosial (Pasal 28 ayat 3).
 5. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (Pasal 28 ayat 4).
 6. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk PAUD (Pasal 29 ayat 1).
 7. Pendidik pada SD/MI memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2).
 8. Pendidik pada SMP/MTs memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs (Pasal 29 ayat 3).

9. Pendidik pada SMA atau yang sederajat memiliki:
- (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana; (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA (Pasal 29 ayat 4).

Kompetensi	Indikator
Integritas moral Kemauan dan kemampuan, individu untuk menyelaraskan, perilakunya dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai etika, dan norma-norma	a. Memiliki keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa
	b. Memiliki toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat
	c. Memiliki etika pribadi dan etika kemasyarakatan
	d. Berperilaku selaras sesuai keyakinan dan nilai yang dianut
	e. Berusaha melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta tahun 2005

Dengan demikian bahwa guru juga harus minimal memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau

sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (b) sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB (Pasal 29 ayat 5).

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah (UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Menurut Prof. Sukamto [2004] dalam Suranto [2006] bahwa sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi, yang terdiri atas dua tahap, yaitu tes tulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan *self appraisal* dan portofolio serta *per-appraisal* (penilaian atasan). Materi tes tulis, tes kinerja, dan *self appraisal* yang dipadukan dengan portofolio, didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Materi tes tulis mencakup kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, sedangkan tes kinerja ber-

bentuk penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran yang mencakup keempat kompetensi secara terintegrasi. Self appraisal yang dipadukan dengan portofolio merupakan penilaian terhadap kegiatan dan prestasi guru di sekolah, dalam kegiatan pro profesional atau di masyarakat, sepanjang relevan dengan tugasnya sebagai guru. Per-appraisal dalam bentuk penilaian atasan dimaksudkan untuk memperoleh penilaian dan kinerja sehari-hari yang mencakup keempat kompetensi. Dengan empat bentuk penilaian tersebut, diharapkan penilaian kompetensi guru dilakukan secara komprehensif.

Lebih jelas Prof. Sukamto menerangkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon peserta sertifikasi guru antara lain: (1) penguasaan terhadap kompetensi; (2) prestasi yang dicapai, misalnya guru teladan, guru berprestasi, dan sebagainya; (3) daftar urut kepangkatan; (4) masa kerja; dan (5) usia. Bagi guru yang lulus dalam sertifikasi akan dihentikan sertifikasi pendidik dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus disarankan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui LPM1P MGMP/KKG atau lembaga lainnya, agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya. Syarat sertifikat pendidik bagi guru adalah: (1) Memenuhi standar kualifikasi akademik (Si atau D4 dan Relevan); (2) Menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Data dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPK) telah menunjukkan, bahwa sekitar 2,05 juta guru (negeri dan swasta) baru 733.881 guru yang berkualifikasi di atas D-3 yang berhak disertifikasi. Selebihnya, 1.323.729 orang, masih berpendidikan D-3 ke bawah. Mereka ini terlebih dahulu harus ditingkatkan kualifikasi pendidikannya sehingga minimal D-4 atau S-1.

H. Peran Sertifikasi Guru

Kita semua mahfum bahwa, landasan yuridis diberlakukan sertifikasi guru dan dosen antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (4) Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang rencananya Oktober 2006 akan segera diberlakukan bahkan menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Dr. Fasli Djalal (*Pikiran Rakyat*, 6 Oktober 2006 hal. 12) mengatakan bahwa: "Awal Januari 2007 *take home pay* guru Minimal 3 juta" [Sani, 2006].

Tujuan sertifikasi dijelaskan oleh Samani (2006), Komara [2006] dalam Suranto [2006] adalah untuk menentukan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Dengan kata lain tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan

menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Prinsip-prinsip profesionalitas menurut UU No. 14/2005 Pasal 7 (1) antara lain: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitas; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru [Komara, 2006].

I. Ciri Guru Profesional

Menurut Tatty S.B. Amran (1994) dalam [Komara, 2006] bahwa untuk mengembangkan profesional diperlukan KASAH adalah akronim dari *Knowledge* (pengetahuan), *Ability* (kemampuan), *Skill* (keterampilan), *Attitude* (sikap diri), dan *Habit* (kebiasaan diri). Menurut Muhammad Hatta (1954:5), yang dimaksud pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Sedangkan ilmu

pengetahuan adalah pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan (analisis).

Sejalan dengan pasal di atas, Gordon (1988) dalam Sani [2006], menjelaskan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut:

- a. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah.
- b. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- c. Keterampilan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan.
- d. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya.
- e. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- f. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

J. Prinsip Sertifikasi

Menurut Komara [2006] Sani [2006] [Departemen Pendidikan Nasional] bahwa Pelaksanaan sertifikasi guru didasarkan pada prinsip sebagai Guru Profesional

- a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel
Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang kelak diskriminatif dan memenuhi

standar pendidikan nasional. Transparan nengacu kepada proses sertifikasi yang nmemberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang diper-tanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkaan kesejahteraan guru.
- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan. Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistemastis. Menghargai pengalaman kerja guru.

Semoga guru-guru bangsa ini sejahtera dan profesional mengemban tugas amanah anak bangsa, lembaga pendidikan yang dikelolanya menjadi unggul dan bermartabat. Selamat berkarya.

Subhanallah, dengan memiliki kemampuan dan berusaha mencapai kemampuan itu, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebab sabda Rasulullah: *"barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga"*. [Al Hadits]

Subhanallah, kemampuan ini menjadikan kalian berwawasan luas, professional dan cermat, sehingga kalian bersifat hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan dengan senantiasa ingat kepada Allah swt.

Padahal setiap kehidupan seseorang adalah milik Allah dan setiap orang telah ditakdirkan Allah sebelumnya dan sesuai kehendak Allah. Tak ada seorang pun yang dapat menunda ketentuan Allah. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Qur'an,

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat. Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."

(QS Ali Imran: 145)

Daftar Pustaka

- 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. Jakarta
- 1989. *Alqur'an dan terjemahnya*. Departemen RI. Jakarta
- A. Razak dan Latief Rais. 1984. *Terjemahan Hadits Shohih*. Pustaka Al-Husna. Jakarta
- Abdul . 2001. *Metode Penelitian Pembelajaran* LP2V Kalimantan.
- Abdullah, 1999 Makalah “*Pengembangan Silabus dan Rencana Pembelajaran Pokok sebagai Ajar Diktat Tindak Lanjut Hasil Uji Kompetensi dan perubahan Kurikulum 2006*” Makalah disampaikan Seminar di Banjarmasin.
- Allyn & Bacon. Purwanto, Ngilim. 2002. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Aqib, Zainal. 2002. *Profesionalisine Guru dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Bahrul. 2005. *Keniscayaan Inovasi Pendidikan dalam ristik, dan Implementasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Bertens. K. *Filsafat Pendidikan, Terjemahan Djumransyah*, tth.ttp
- Budirahayu. 2002. “*Kondisi Moralitas Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global*”, Makalah Seminar FE. Unibraw. Malang.
- Cross. Aleene. A 1979. *Vocational Intruccion*. American Vocational Association. Print by USA
- Cossmen E Joseph dan William A Cohen, 1994. *Making I Wealth Building Secrets From ow Great Enterpreneursip*, Prantice Hall. New Jerse
- Dave, RH. 1967. *Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing*. London: University of London Press.
- 2006. Departemen Pendidikan Nasional

- Dharma, Satria. 2005. *Makalah Kurikulum Berbasis Kompetensi*. 14 Februari 2005. Suara Kita. Balikpapan. Kalimantan
- Direktorat jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Direktorat P2TK dan KPT, Ditjen Dikti, Depdiknas R.I. 2004. *Standar Kompetensi Guru Pemula PGSMK*. Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas. 2003. *Pembelajaran Kontekstual*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas. 2003. *Standar Kompetensi Guru SMU*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas. 2003. *Standar Kompetensi Guru SMU*. Jakarta: Depdiknas.
- Djunaidi, M. 2004. *Peningkatan Pembelajaran Efektif*. Jurnal Ilmiah Teknik Industri UMS. Volume 3. No 6. April 2004.
- Era Teknologi Informasi dan Kornunikasi," Makalah Seminar , 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosda Karya 28 April 2005 di Jakarta. Karya.
- Fajar, Arnie. 2006. *Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*. Dalam Makalah Seminar Nasional Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam memaknai UU No. 14 Tahun 2005. Bandung: Disdik Jawa Barat.
- Fajar, Arnie. 2004. *Portofolio dalam Penthelajaran IPS*. Bandung: Rosda Karya.
- Fattah. Nanang. 2002, dan Pembiayaan Pendidikan. Remaja, Rosda Karya. Bandung.
- Fifa Mulia. Joni, T. Raka. 1980. *Pengembangan Kurikulum IKIP/FIP/FGK*:
- Foister, Margaret, dan Masters, G. 1996. *Portfolios Assessment Resource Kit*. Camberwell, Melborne: The Australian Council for Educational Research Ltd.
- Gardner. Howard. 1993. *Multiple Intelegences*, New York. Basic Books Harper Collin Publ. Inc.
- Gronlund, E. Norman. 1982. *Constructing Achievement Tests in Teaching*. New Jersey: Prentice Hall. London: Prentice Hall.
- Gordon Thomas. 1997. *Menjadi Guru Efektif*. Gramedia. Jakarta

- Hamalik, Oemar. 2002. *Media Pendidikan*. (Cetakan ke-7). Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamalik, Urnar. 1991. "Pendidikan Guru Konsep dan Strategi. Kompetensi," Makalah Seminar Nasional Pendidikan. HEPI, Bandung: Mandar Maju. Yogyakarta.
- Hasan, S. Hamid. 2002. "Kurikulum Berbasis Kompetensi. Vol.1.Juni2004.
- Ibrahim, Muslimm. 2000. *Pembelajaran Kooperatif*, Bandung: Rosda University Press.
- Ibrahim, R. 2003. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jalal, Fasli. 2004. *Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Depdiknas Jakarta.
- Jalal, Fasli. 20006. *Gaji Guru Naik Mulai Januari 2007: Take Home Pay Minimal Rp. 3 Juta*. Dalam *Pikiran Rakyat* 6 Oktober 2006 hal. 12.
- Kaluge, 2002. *Makalah Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup, Mahasiswa S3*. Pendidikan mateamatika ENESA
- Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Penelitian*. Kit. Cam. 2006. "Kurikulum Baru itu Terlalu Tergesa-gesa," berwell, Melbourne: The Australian Council for Educational Kompas, 2 Oktober 2006.
- Komara, Endang. 2006. *Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*. Makalah stkip. Cimahi. Bogor
- Kunandar. 2004. "Penilaian Berbasis Kompetensi dalam Kuri Nurhadi dkk. 2003. -*Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya*. Buletin LPMP DKI Jakarta, Volume 1 Nomor 2, dalam KBK. Universitas Negeri Malang, Malang. Mei 2004.
- Mardapi, Djemari. 2004. "Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis. UNY Yogyakarta.
- Mardapi. Djemari. Dkk, 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menehngah Atas [Pedoman mendeteksi Potensi Peserta Didik]* Tim Peneliti Pasca Sarjana UNY. Yogyakarta.
- Mukhtar. 2001. *Pengajaran Remedial*, Jakarta: .
- Mulyadi, Agus. 2004. "Optimalisasi Peran Personil Dalam Pembelajaran.

- Mulyasa. 2005. ----Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakter Hayat Bahrul. 2005.
- N.K.Roestiyah.1989.*Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Pradnya Paramita. PT Bina Aksara.
- Naisbit, John & Aburdene, Patricia. 1990. *Megatrend 2000: Sepuluh Arah Baru Pendidikan Tinggi*, Bagian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Natawidjaja, Rochman. 1985. *Cara Belajar Siswa Aktif dan Suatu Kasus Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi. Penerapannya Dalam Metode Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jakarta: P3G Depdikbud. Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.
- Nimas Multima. Sahertian, Pict dan Ida Alicda. 1990. *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, Muhamad. 2004. *Kiat menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Prisma Sophie.
- Nurhalda dan Rudito, 1980. *Desain Instruksional*. Jakarta: P3G Dep Mc 2005. Dikbud. Jakarta
- Nurkencana, Wayan. 1986. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Pemerintah (UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Popham, W.j. 1995. *Classroom Assesment, Need to Know*. Boston:
- Pramukantoro, J.A dan Widiyarti. 2006, *Penyelenggaraan dan Pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan*. Makalah PPs Program Doktor UNY, Yogyakarta.
- Research Ltd. Linn, R.L., dan Gronlund, N.E. 1995. *Measurement and Assessment*
- Sagala, Syaiful. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta:
- Sairin, Winata. 2003. 'Realitas Dunia Pendidikan Indonesia,' *Makalah Pendidikan*. 2 Agustus 2003 di Jakarta.

- Usman, Marsuki. 2004. *Sakernas DPR RI*, Makalah Laporan Pengangguran SDM Indonesia, Jakarta
- Samani, Muchlas, dkk. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Sani, Abdul, 2006. *Pendidikan di Indonesia [Prespektif Menuju Perubahan dan Vokasional]*, Cetakan-1, Sumbangsih Press, Yogyakarta.
- Sanjaya, Wina. 2005. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sardiman, A.M. 2001. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saryono. 2002. *Peningkatan Profesionalisme Guru Memasuki Abad Pengetahuan,*" Makalah Seminar Pendidikan. di FKTP UMM.Malang.
- Sidi, Indra Djati. 2003. *Menuju Masyarakat Belajar Paradigma Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Sindhunata, (editor), 2001. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Jogjakarta. Penerbit Kanisius.
- Slamet, PH. 2005. *Makalah Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar*
- Soedibyo, Bambang, 2005. Makalah "kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu dan Kualitas Manusia di Indonesia" dalam *Bunga Rampai "Pintu-Pintu Menuju Kebangkitan Islam dan Indonesia*, FORPIS, Jakarta.
- Sudjana, N. dan Rivai, A. 1990. *Media Pengajaran*. Bandung: Penerbit CV. Sinar Baru Bandung.
- Sudjana, Nana. 1991. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono, 2006. *Pendidikan Ketenagakerjaan*. PPs UNY Doktor-Yogyakarta.
- Suhaenah Suparno, Ana.. 2000. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
- Suharno, 2004. *"Strategi Pengembangan Pendidikan,"* Buletin PPPG Tertulis Bandung. N. 1 Vol. 1 Juni -2004.
- Suherman 2002. *Active Learning*. Yogyakarta: Yappanelis.

- Sukamto, 2004, "Pengembangan Sistem Penilaian untuk Sertifikasi Guru," *Makalah Seminar Nasional Pendidikan*, HEPI, Yogyakarta.
- Sumber: Didas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah tinggi DKI Jakarta tahun 2005
- Sumber: Laporan Kompas Akhir Tahun dari data, BPS dalam Kompas, 11 Februari 2006
- Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprayekti. 2003. *Interaksi Belajar Mengajar*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Suranto, 2002. *Peningkatan Mutu Pendidikan di Jurusan Teknik Industri UMS dengan Penerapan Quality Control Circle*. Jurnal Ilmiah Teknik Industri UMS. Volume. Desember 2002
- Suranto. 2005. "Focused Based Education Sebagai Solusi Peningkatan Mutu Sistem Pendidikan Di Indonesia". *Makalah Seminar Mahasiswa Teknik Industri UMS*. Surakarta.
- Suranto. 2005. "Menyongsong Reformasi Pendidikan Vokasi di Indonesia." *Makalah Filosofis Tentang Pendidikan Vokasi*. Mahasiswa PPs S3. UNY. Yogyakarta.
- Suranto. 2006. "Peran Sertifikasi Guru Membentuk Profesionalisme". *Makalah PPs*. Doktor Uny, Yogyakarta
- Surapranata, Sumarna. 2004. *Analisis, Validitas dan Interpretasi Hasil Implementasi Kurikulum*. Bandung: Rosda Karya.
- Surayin. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*. Bandung: Yrama Widya.
- Surya, Muhammad. 1999. "Membangun Manusia Unggul Perlu Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru," *Majalah Gem Widyakarya*, PGRT DKI Jakarta, No. 9/Th. IV/1999.
- Suyanto, dan Abbas. M.S. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Adi Cita. Yogyakarta.
- Suyono, Haryono, 2003. *Membangun Mutu Modal Manusia Indonesia Menghadapi Era Global*. http://www.depdiknas.go.id/serba_serbi/Renstra/bab-IV.htm
- Tampubolon, Mangatas. 2004. "Paradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan Sistem High Based Education Menghadapi

- Tantangan Abad Ke-21 Di Indonesia". *Makalah Seminar Pendidikan* di FIP-UNIMED Medan.
- Tilaar, H.A.R., 2001. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Tim Sertifikasi Guru dan Lulusan. 2006. *Bahan Sosialisasi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi.
- Umar, Jahja, 1999. "Pengembangan Sistem Penilaian untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional di Era Global," *Makalah Seminar Nasional Pendidikan*, HEPI, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (4) Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang rencananya Oktober 2006 akan segera diberlakukan bahkan menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru Dan Dosen*. 2006. Jakarta: Eka Jaya.
- Unesco, 1980. *Technical and Vocational Education in Asia Ociana*. Bangkok. Bullentin of the Unesco Regional Office For Education in Asia and Oceana. Number 21, Bangkok.
- Usaha Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Usman, M. Uzer. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Usman, Marzuki. 2005. "Mutu Sumber Daya Manusia Dan Perluasan Kesempatan Kerja". *Makalah. Majalah Nakertrans Edisi - 03 TH.XXIV-Juni 2004*.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Wandr, Edwin and Gerald W. Brown. 1977. *Essentials of Edoectional Evaluation*. Holt Rinehart and Winston.
- Yacub, Muhammad, 1999, "Suatu Opini Mengenai Reformasi Sistem Pendidikan Nasional." *Makalah Seminar IPSI*.
- Zamroni, 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Biograf Publishing.

Biografi Penulis



Abdul Sani, Lahir di Danau Panggang, Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, 3 Mei 1963. Pendidikan Dasar di selesaikan di HSO hingga SMA di Banjarmasin. Pendidikan Sarjana Ushuluddin di IAIN Antasari Kalimantan Selatan, S2 Bidang Sosial Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. S3 Bidang Doktor Vokasi di tempuh di Universitas Negeri Yogyakarta.

Aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan dan konsultan pendidikan serta organisasi masyarakat. Sekarang menjabat Ketua Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin. Telah menulis lebih dari puluhan karya ilmiah populer baik di majalah, koran harian lokal dan buku ilmiah baik umum, agama dan ilmiah populer. Aktif di Lembaga pusat kajian pengembangan pendidikan di Kalimantan Selatan. Saat ini merangkap menjadi Ketua Yayasan Falsafatuna di Banjarmasin.



Suranto [Suranto. S. Siswaya]. Lahir di Sragen, Menamatkan Pendidikan Dasar di Sragen dan Melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, Kemudian melanjutkan Program S1 di Program Studi Teknik Industri dalam bidang Manajemen Industri, dan S2 di Program Manajemen Operasi dalam Bidang Rekayasa Kualitas. Sedang menyelesaikan S3 [Doktor] dalam bidang Vocational Education Universitas Negeri Yogyakarta.

Biografi Penulis



Abdul Sani, Lahir di Danau Panggang, Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, 3 Mei 1963. Pendidikan Dasar di selesaikan di HSO hingga SMA di Banjarmasin. Pendidikan Sarjana Ushuluddin di IAIN Antasari Kalimantan Selatan, S2 Bidang Sosial Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. S3 Bidang Doktor Vokasi di tempuh di Universitas Negeri Yogyakarta.

Aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan dan konsultan pendidikan serta organisasi masyarakat. Sekarang menjabat Ketua Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin. Telah menulis lebih dari puluhan karya ilmiah populer baik di majalah, koran harian lokal dan buku ilmiah baik umum, agama dan ilmiah populer. Aktif di Lembaga pusat kajian pengembangan pendidikan di Kalimantan Selatan. Saat ini merangkap menjadi Ketua Yayasan Falsafatuna di Banjarmasin.

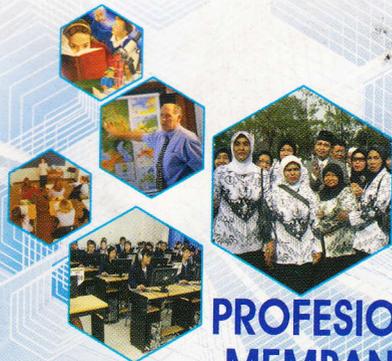


Suranto [Suranto. S. Siswaya]. Lahir di Sragen, Menamatkan Pendidikan Dasar di Sragen dan Melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, Kemudian melanjutkan Program S1 di Program Studi Teknik Industri dalam bidang Manajemen Industri, dan S2 di Program Manajemen Operasi dalam Bidang Rekayasa Kualitas. Sedang menyelesaikan S3 [Doktor] dalam bidang Vocational Education Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga pernah menjadi Dosen Tamu di beberapa Perguruan Tinggi di Surakarta, di Universitas Setia Budi Surakarta, STMIK AUB Surakarta, Politeknik Indonusa Surakarta dan PP Modern Assalaam Surakarta serta masih mengajar di Salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta.

Pernah Menjabat Sebagai Kepala Lab Teknik Industri, Sekertaris Jurusan Industri, Ketua Dewan Redaksi Majalah Ilmiah Teknik Industri, Reviewer dan Mitra Bestari di Majalah Ilmiah Infotech.

Saat ini aktif membina generasi muda dalam sanggar Media Azzahra yang bergerak dalam bidang pengembangan SDM: peningkatan life skill dan pembuatan ide-ide buku dan naskah kreatif ilmiah. Lebih dari 75 buku yang di tulis baik buku umum, agama, sosial, lingkungan, pendidikan, pengembangan potensi diri dan kajian referensi perkuliahan yang telah terbit dan akan terbit, juga sedang menulis lebih dari 100 buku untuk proyek APBNP, SSN, Dekon, TBM dan Keaksaraan [PLS] serta Perpustakaan. Aktif juga dalam bidang penulisan jurnal ilmiah dan bidang penelitian dunia pendidikan.



PROFESIONALISME GURU MEMBANGUN SEKOLAH UNGGUL BERKARAKTER (Tantangan Masa Depan)

Guru profesional harusnya memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, selalu melakukan pengembangan secara terus-menerus (*continuous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya. Kondisi yang demikian diharapkan mampu menggali potensi dan kreativitas peserta didik.

Problematika pendidik (guru) profesional dalam dinamika lembaga pendidikan perlu dijadikan satu kerangka acuan atau panduan profetik bagi guru atau tenaga pendidik lainnya.

Dalam buku **Profesionalisme Guru Membangun Sekolah Unggul Berkarakter (Tantangan Masa Depan)** ini dijelaskan mengenai acuan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang bersifat praktis dan dapat dipraktikkan, tetapi ada juga yang bersifat teoritis dan wacana yang sebagian sebagai upaya untuk mencerahkan strategis menuju kecintaan terhadap lapangan pekerjaan sebagai guru.

PT. SINDUR PRESS

Jl. Pleburan VIII/64 Semarang
Telp. (024) 6580335 - 6582901
Fax. (024) 6582903 - 6581440

ISBN 978-979-067-034-1



3 1 7 4 1 1 2 4 5 5